



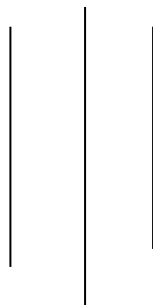
LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA

**KOMISI V DPR RI KE PROVINSI MALUKU
DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP
PROSES REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI
PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI KAB.
KEPULAUAN TANIMBAR**

PADA RESES MASA PERSIDANGAN III 2022-2023

TANGGAL 17 - 21 FEBRUARI 2023



**KOMISI V DPR-RI
JAKARTA, 2023**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

| | |
|------------------------------|---|
| I.1. Dasar Hukum | 3 |
| I.2. Maksud dan Tujuan | 3 |
| I.3. Lokasi dan Waktu | 4 |
| I.4. Agenda Kunjungan | 4 |

II. HASIL PENINJAUAN

5

| | |
|---|---|
| II.1. Gambaran Umum | 5 |
| II.1. Temuan, Permasalahan dan usulan | 6 |
| II.2. Kesimpulan / Rekomendasi | 8 |

III. PENUTUP

10

LAMPIRAN

11

| | |
|--------------------------|----|
| Foto-foto kegiatan | 11 |
|--------------------------|----|



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI V DPR RI KE PROVINSI MALUKU
DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP PROSES REKONSTRUKSI
DAN REHABILITASI PASCA BENCANA GEMPA BUMI
DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III 2022-2023
TANGGAL 17 - 21 FEBRUARI 2023**

=====

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23.
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 7 huruf d; dan
4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI Tanggal 11 Januari 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Maluku ini adalah:

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kab. Kepulauan Tanimbar.

Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:

butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*

butir d. *Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:"

butir f *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kab. Kepulauan Tanimbar pada reses Masa Persidangan III 2022-2023, yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 21 Februari 2023 **yang dipimpin langsung oleh Bapak Muhammad Iqbal, SE, M.COM (A-461/ F-PPP).**

I.4. Agenda Kunjungan

Beberapa agenda kegiatan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI RI ke Provinsi Maluku dalam rangka pengawasan proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kab. Kepulauan Tanimbar, adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Mitra Kerja Komisi V DPR RI, dan *stakeholders* untuk membahas tentang permasalahan dan pengembangan Infrastruktur.
2. Peninjauan secara langsung terminal penumpang di Pelabuhan Laut Yos Sudarso, yang merupakan pelabuhan utama di Provinsi Maluku.

II. HASIL KUNJUNGAN

II.1. Gambaran Umum

Luas Wilayah Kab. Kepulauan Tanimbar : 11.980,07 Km² dengan luas daratan: 4.461,08 Km² (37,24%) dan lautan: 7.518,99 Km² (62,76%). Jumlah Pulau: 278 Pulau (Berpenghuni : 44 dan Tak Berpenghuni : 234). Empat Pulau Terluar: Pulau Selaru (Berpenghuni), Pulau Larat (Berpenghuni), Pulau Astubun dan Pulau Batarkusu. Jumlah Kecamatan: 10 Kecamatan, Kelurahan: 2 Kelurahan dan Desa: 80 Desa. Jumlah Penduduk: 128.224 jiwa, Laki-laki: 64.550 jiwa dan Perempuan: 63.674 jiwa. Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Propinsi Maluku **difokuskan untuk membahas terkait Kerusakan Infrastruktur dan Transportasi akibat gempa bumi.**

Kejadian gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terjadi pada tanggal 10 Januari 2023, pukul 02.47 WIT, dengan rincian sebagai berikut:

- Gempa bumi adalah jenis gempa tektonik dengan kekuatan 7,9 SR (kemudian di *update* menjadi 7,5 SR)
- Berlokasi di laut pada jarak 136 Km arah Barat Laut dan kedalaman 130 Km
- Sampai tanggal 18 Januari 2023, tercatat 29 gempa bumi susulan

Akibat gempa ini terjadi kerusakan rumah penduduk/ warga dengan total berjumlah 69 unit, serta kerusakan sarana prasarana lainnya termasuk sarana prasarana pemerintahan, pendidikan, kesehatan dll.

II.2. Temuan, Permasalahan dan Usulan

Beberapa temuan dan permasalahan yang diperoleh dari Kunjungan Kerja ke **Provinsi Maluku** dalam rangka pengawasan proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kab. Kepulauan Tanimbar antara lain:

I. Kementerian PUPR

1. Kondisi Jalan Nasional di Kab. Kepulauan Tanimbar sepanjang 226 km sudah mantap 93,33%, sedangkan Jalan Kabupaten sepanjang 351,83 km hanya mantap 54,56%.
2. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rumah Tangga yang belum memiliki akses air minum layak perkotaan dan perdesaan sebanyak 22.854 KK (62,85%)

3. Target penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin hingga 2022 adalah 5.000 unit (95,90%) sementara capaian pemenuhan Rumah Layak Huni hingga 2021 adalah sebanyak 3.654 unit (73,08%), sehingga masih dibutuhkan 1.346 unit rumah layak huni.
4. Kerusakan di kantor Bupati Tanimbar meliputi 3 lantai yaitu lantai 2, lantai 3 dan lantai 4.
5. Kerusakan di Gedung SD Negeri 1 Saumlaki meliputi lantai 1 dan lantai 2 yang disebabkan karena rusaknya area kolom dari kolom lantai1 sehingga tidak mampu menahan beban di lantai berikutnya.
6. Beberapa usulan dari Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar terkait sektor PUPR:
 - a. Rehabilitasi Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar;
 - b. Rehabilitasi SD Negeri 1 Saumlaki;
 - c. Rehabilitasi Puskesmas Saumlaki;
 - d. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - e. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (Peningkatan Kualitas) di 9 kecamatan sebanyak 845 unit;
 - f. Pembangunan Rumah Susun ASN Perbatasan (Kesehatan) di Kecamatan Tanimbar Selatan sebanyak 1 Twin Blok;
 - g. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Adaut di Kecamatan Selaru;
 - h. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kota Larat Kecamatan Tanimbar Utara;
 - i. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Alusi Kelaan di Kecamatan Kormomolin.

II. Kementerian Perhubungan

1. Beberapa kondisi prasarana/fasilitas Pelabuhan Yos Sudarso yang perlu mendapat perhatian:
 - a. Kondisi terminal penumpang yang kurang layak dari sisi Kapasitas dan Kualitas (dibangun pada tahun 1970an);
 - b. Jalan akses lingkungan Pelabuhan Yos Sudarso masih sempit;

- c. Sempitnya area parkir kendaraan yang menyebabkan kemacetan/kesemrawutan;
 - d. Kios Pedagang tidak tertata baik dan dijadikan hunian;
 - e. Tidak berfungsinya X-ray dan CCTV di terminal penumpang;
 - f. Belum terdapat Garbarata, sehingga penumpang untuk naik dan turun tangga masih manual;
 - g. Gate pintu akses pelabuhan masih manual, sehingga proses buka tutup berjalan lambat;
 - h. Sistem keamanan Pelabuhan belum 24 jam, sementara dibutuhkan keamanan penuh 24 jam;
2. Usulan Bupati Kab. Tanimbar terkait sektor perhubungan:
- a. Rehabilitasi Dermaga (*Moveable bridge*) Pelabuhan Penyeberangan Larat, Kecamatan Tanimbar Utara
 - b. Rehabilitasi Kelengkapan Dermaga Penyeberangan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.

III. Kementerian Desa PDT Transmigrasi

Status perkembangan desa di Kab. Kepulauan Tanimbar saat ini adalah desa maju 72%, desa mandiri 9% dan desa berkembang 19%. Sudah tidak ada desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal pada tahun 2022. *Trend* peningkatan tertinggi desa berstatus maju terjadi pada tahun 2022, namun demikian perlu akselerasi meningkatkan jumlah desa berstatus mandiri.

IV. BMKG

1. Hal yang dapat dinyatakan dari gempa bumi di Kab. Kepulauan Tanimbar adalah sebagai berikut: Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan **jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Laut Banda**. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (*oblique thrust*).

2. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Saumlaki, Dobo, Kei, Sorong, Kaimana dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah), serta di daerah Banda dengan skala intensitas II MMI. Hasil analisis menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.

V. BNPP/ Basarnas

Di Kab. Kepulauan Tanimbar hanya memiliki 1 Pos SAR yaitu Pos SAR Saumlaki yang terdapat di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sementara daerah yang harus dijangkau cukup luas meliputi wilayah daratan dan laut, yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadinya kecelakaan transportasi maupun bencana alam.

II. 3. Rekomendasi dan Kesimpulan

Beberapa kesimpulan/rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja ke Provinsi Maluku dalam rangka pengawasan proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kab. Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, adalah sebagai berikut:

I. Kementerian PUPR

1. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian PUPR untuk segera membantu perbaikan bangunan yang rusak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Kabupaten Kepulauan Tanimbar digoncang gempa dengan kekuatan 7,2 skala richter pada 10 Januari 2023 lalu, termasuk rumah warga, kantor bupati dan fasilitas sekolah. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tanimbar dan instansi terkait lainnya untuk mendata dan menginventarisir jumlah kerusakan infrastruktur yang harus segera direhabilitasi dan direkonstruksi.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar memperhatikan usulan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

II. Kementerian Perhubungan

1. Komisi V DPR RI meminta agar Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki sarana dan prasarana fasilitas Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon antara lain:
 - a. Perbaikan dan perluasan akses jalan dan zona niaga/komersil Pelabuhan serta areal parkir;
 - b. Modernisasi fasilitas/peralatan pendukung di Pelabuhan seperti *X-ray*, *e-Autogate System* (gate pintu akses otomatis), Garbarata, CCTV, dan Peralatan Bongkar Muat;
 - c. Pemenuhan jumlah dan kualitas tenaga pengamanan Pelabuhan.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub agar berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk meninjau Kembali peentuan harga tiket dari Ambon – Kab. Kepulauan Tanimbar yang dirasakan masyarakat masih cukup mahal.

III. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di kawasan perdesaan di Kab. Kepulauan Tanimbar, sehingga seluruh desa berkembang dapat bertransformasi menjadi desa mandiri dan desa maju.

IV. BMKG

1. Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk meningkatkan peralatan dan instrument-nya dalam mendeteksi gempa bumi dan memprediksi tsunami, sehingga diperoleh informasi yang lebih akurat dan lebih cepat.
2. Komisi V DPR RI mendukung BMKG untuk melakukan perbaikan kantor BMKG di Kota Ambon

V. BNPP/Basarnas

Komisi V meminta agar Kantor SAR Ambon dan Pos Sar Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mengantisipasi bencana khususnya gempa bumi dan tsunami.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun 2022-2023 ke Provinsi Maluku dalam rangka pengawasan proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kab. Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini sebagai data/informasi yang akan disampaikan dalam Rapat dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI.

KETUA TIM,

ttd

Muhammad Iqbal, S.E., M.COM

No: A-461

LAMPIRAN

Foto-foto kegiatan













